

# **PERANAN DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**Purwanto**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui mekanisme, proses, agenda serta faktor pendukung maupun penghambat, mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul terhadap Pemerintah daerah Kabupaten Bantul setelah perubahan UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan untuk melatih kemampuan dan keahlian penulis dalam melakukan penelitian dibidang Ilmu Hukum, khususnya yang berhubungan dengan Peranan DPRD Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul.

Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah mengenai Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mempunyai objek peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis, politis, empiris. Yuridis, digunakan untuk mengetahui landasan hukum yang melatarbelakangi masalah. Politis, untuk mengetahui adanya keputusan politik berkenaan dengan masalah terkait. Empiris, dengan melihat pelaksanaan tugas dilapangan. Sebagai bahan penelitian adalah bahan hukum publik dan hukum privat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bantul terhadap Pemerintah Daerah dengan mekanisme secara langsung, diperoleh hasil bahwa pengawasan pada umumnya berjalan sesuai yang diinginkan. Semua didukung oleh beberapa faktor, baik dari DPRD sendiri maupun dari luar yaitu masyarakat. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya DPRD mengalami kendala, tetapi DPRD tetap melaksanakan tugas pengawasannya dengan meningkatkan kemampuan dan etika politik yang baik agar dapat menciptakan Pemerintah Daerah sesuai dengan cita-cita dan aspirasi masyarakat daerah Kabupaten Bantul dengan Berdasarkan Undang-